

KONFLIK LATEN PT. SADHANA DAN PETANI PENGGARAP SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Samlan¹, Ahmad Tohri², Abdullah Muzakar³, M. Zainul Asror⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi
Email: samlanflores0506@gmail.com; tohri@hamzanwadi.ac.id;
abdullahmuzakar@hamzanwadi.ac.id; asror.mz@hamzanwadi.ac.id

Artikel histori:

Submit: 12-01-2023

Revisi: 10-03-2023

Diterima: 25-05-2023

Terbit: 30-06-2023

Kata Kunci:

latent conflict,
cultivator farmers,
agrarian conflict,
community economy,
Senanggalih

Korespondensi:

asror.mz@hamzanwadi.ac.id

Abstrak: This study examines the pattern of latent conflict between PT. Sadhana and cultivator farmers and its implications for the community economy in Senanggalih Village, Sambelia District, East Lombok Regency. The study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through naturalistic observation, interviews, and documentation involving 16 informants consisting of village officials, community representatives, and farmers. Data were analyzed through reduction, display, and conclusion or verification, with validity strengthened through source, technique, and time triangulation. The findings show that the latent conflict developed as a continuation of earlier open land conflict after mediation reduced overt confrontation without resolving the underlying dispute over access and management of land. The latent pattern was reflected in negative discussion, complaints, surveillance, rejection or ignoring of company requests, delayed responses, unorganized resistance to partnership, and generalized distrust. The economic implications were most visible in agricultural production because cultivator farmers faced limitations in accessing land, capital, technology, and agricultural infrastructure. The company's contribution through employment, empowerment, and social infrastructure was considered limited by informants and had not substantially improved the local economy. The study concludes that unresolved tenure relations and weak communication can reproduce latent conflict and constrain local economic development.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Konflik agraria merupakan persoalan sosial yang tidak hanya berhubungan dengan perebutan tanah, tetapi juga menyangkut kepentingan, legitimasi penguasaan sumber daya, hubungan kekuasaan, dan akses terhadap sumber kehidupan. Dalam masyarakat pedesaan, tanah mempunyai kedudukan strategis

karena menjadi basis produksi sekaligus tempat berlangsungnya kehidupan sosial. Perubahan pihak yang memperoleh akses pengelolaan tanah karena itu dapat menimbulkan ketegangan apabila keputusan tersebut tidak diterima secara sosial oleh pihak yang sebelumnya bergantung pada lahan.

Fenomena tersebut tampak pada hubungan antara PT. Sadhana Ariefnusa dan petani penggarap di Desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. PT. Sadhana memperoleh izin pengelolaan kawasan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.256/Menhut-II/2011. Dokumen penelitian mencatat bahwa izin tersebut mencakup kawasan hutan produksi pada beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Barat, sementara bagian yang berada di Lombok Timur disebut mencapai 1.883 hektare. Pada saat izin tersebut berlaku, sebagian kawasan telah ditempati dan dikelola masyarakat, terutama petani penggarap.

Petani penggarap memiliki pengalaman panjang dalam mengolah lahan. Informan menyebut sebagian warga telah berada di kawasan sejak 1990-an, sedangkan sebagian lain menyatakan memperoleh hak kelola melalui program GRAHAN sekitar 2005-2006. Dalam pengalaman masyarakat, lahan tidak sekadar dipahami sebagai tempat bekerja. Lahan dipandang sebagai sumber kehidupan yang membentuk keberlangsungan rumah tangga. Pandangan tersebut tercermin dalam ungkapan lokal “te bait tanak te bait nyawe”. Pada saat yang sama, perusahaan memperoleh legitimasi formal melalui keputusan pemerintah. Perbedaan antara legitimasi formal dan legitimasi yang dirasakan masyarakat menjadi dasar penting bagi terbentuknya konflik tenurial.

Konflik pernah berkembang menjadi konflik terbuka ketika perusahaan merencanakan penanaman kayu pada kawasan yang juga digunakan petani untuk bercocok tanam. Informan menggambarkan adanya pengusiran, keterlibatan aparat penegak hukum, penangkapan beberapa petani, serta proses mediasi pemerintah. Karena informasi mengenai tindakan tersebut bersumber dari wawancara dan pengalaman sosial informan, temuan ini dalam artikel diposisikan sebagai persepsi dan pengalaman masyarakat, bukan sebagai penetapan hukum mengenai kesalahan pihak tertentu.

Mediasi pemerintah berhasil mengurangi konflik terbuka, tetapi belum mempertemukan seluruh kepentingan. Perusahaan tetap memiliki dasar izin pengelolaan, sedangkan petani penggarap masih mempertahankan akses terhadap sebagian lahan dan menolak sejumlah bentuk kemitraan. Di sinilah konflik berubah dari bentuk manifest menuju bentuk laten. Konflik tidak lagi terutama ditampilkan melalui konfrontasi terbuka, melainkan melalui penolakan, pengawasan, pembicaraan negatif, ketidakpercayaan, dan resistensi pasif terhadap program perusahaan.

Penelitian ini menggunakan indikator konflik laten yang dirujuk dari Anstrand melalui Muary (2018), yaitu gossip, complaining/bitching/venting, surveillance, ignoring requests, delaying response, hidden agendas, dan lumping it. Indikator tersebut dipakai untuk membaca pola komunikasi dan perilaku yang memperlihatkan keberlanjutan pertentangan meskipun ekspresi konflik terbuka telah menurun. Penggunaan indikator komunikasi juga memungkinkan konflik dipahami sebagai proses sosial yang hadir dalam interaksi sehari-hari.

Persoalan konflik menjadi semakin penting karena Desa Senanggalih merupakan masyarakat bercorak agraris. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, buruh tani, dan buruh perkebunan. Profil desa yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa penguasaan lahan petani umumnya berkisar

0,1-1 hektare, dengan sebagian kecil mencapai 5 hektare. Selain pertanian dan perkebunan, terdapat perdagangan eceran, sementara sektor ekonomi lainnya belum menjadi penopang utama masyarakat.

Kondisi ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pilihan pekerjaan juga terbatas. Dari 1.496 orang angkatan kerja usia 18-56 tahun yang dicatat dalam profil desa, 821 orang telah bekerja; 559 di antaranya bekerja tidak tentu dan 262 bekerja penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerjaan tidak tetap merupakan bagian penting dari struktur ekonomi lokal. Oleh karena itu, perubahan akses terhadap lahan pertanian dan terbatasnya kesempatan kerja dapat berpengaruh terhadap kemampuan rumah tangga mempertahankan kehidupannya.

Implikasi konflik dalam penelitian ini tidak dipahami semata-mata sebagai perubahan pendapatan yang dapat dihitung secara statistik. Implikasi dimaknai sebagai hubungan antara kondisi konflik dengan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi. Pendekatan tersebut mengikuti perspektif sosiologi ekonomi yang memandang tindakan ekonomi melekat pada struktur sosial dan hubungan antarpihak (Damsar, 2002). Dengan demikian, penelitian berupaya menjelaskan mekanisme sosial yang membuat konflik laten berhubungan dengan aktivitas ekonomi.

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pola konflik laten antara PT. Sadhana dan petani penggarap serta menjelaskan implikasinya terhadap perekonomian masyarakat Desa Senanggalih. Fokus tersebut penting karena berkurangnya konflik terbuka tidak selalu menunjukkan bahwa konflik telah selesai. Konflik yang tersimpan dalam hubungan sosial dapat terus memengaruhi kepercayaan, kerja sama, penerimaan program, dan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.

KAJIAN LITERATUR

Dalam perspektif konflik sosial, pertentangan muncul karena adanya perbedaan tujuan, kepentingan, nilai, kekuasaan, dan akses terhadap sumber daya. Konflik tidak selalu berarti kekerasan. Ketegangan dapat hadir dalam bentuk persaingan, penolakan, pembatasan kerja sama, atau perebutan legitimasi. Pandangan ini membantu menjelaskan konflik agraria sebagai persoalan yang melibatkan lebih dari sekadar status kepemilikan tanah.

Lewis Coser menempatkan konflik sebagai bagian dari kehidupan sosial dan menunjukkan bahwa konflik dapat mempunyai fungsi tertentu, antara lain memperkuat solidaritas kelompok, mempertegas batas kelompok, dan membuka komunikasi mengenai persoalan yang sebelumnya tidak mendapatkan perhatian. Namun, fungsi tersebut tidak berarti konflik selalu menghasilkan integrasi. Apabila konflik tidak menyentuh sumber persoalan, ketegangan dapat bertahan dan berubah bentuk menjadi konflik laten (Raho, 2021).

Konflik laten merupakan kondisi ketika potensi pertentangan masih ada tetapi tidak selalu ditampilkan dalam bentuk konfrontasi langsung. El Amady (2021) menjelaskan bahwa konflik laten menyimpan potensi yang tersembunyi sehingga perlu dikenali agar dapat dikelola. Dalam penelitian ini, konflik laten dipahami sebagai kelanjutan dari konflik terbuka yang telah diredam melalui mediasi, tetapi belum menghasilkan kesepakatan substantif mengenai kepentingan dan akses lahan.

Anstrand, sebagaimana dirujuk Muary (2018), menawarkan pembacaan konflik laten melalui pola komunikasi. Gossip menunjukkan pembicaraan negatif mengenai

pihak lain; complaining/bitching/venting menunjukkan ekspresi kekecewaan; surveillance menunjukkan pengawasan; ignoring requests menunjukkan pengabaian permintaan; delaying response menunjukkan penundaan respons; hidden agendas menunjukkan kecenderungan menyimpan agenda tertentu; dan lumping it menunjukkan kecenderungan menggeneralisasi pelanggaran atau kesalahan pihak lain. Ketujuh indikator ini dipakai sebagai kategori analisis dalam penelitian.

Teori Dahrendorf digunakan untuk memperkuat pembacaan mengenai kekuasaan. Konflik tidak hanya didasarkan pada kepemilikan alat produksi, tetapi juga pada posisi dalam struktur kekuasaan. Dalam konflik Senanggalih, perusahaan memperoleh posisi kuat melalui izin formal negara, sedangkan petani penggarap berada pada posisi yang lebih lemah dalam struktur legal, walaupun memiliki pengalaman panjang dalam mengelola lahan. Relasi tersebut menghasilkan ketegangan antara pihak yang mempunyai otoritas formal dan pihak yang mempunyai legitimasi sosial berdasarkan pengalaman pengelolaan.

Konsep ekonomi masyarakat digunakan untuk menghubungkan konflik dengan kehidupan sehari-hari. Damsar (2002) menjelaskan ekonomi sebagai fenomena sosial yang mencakup aktivitas produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang serta jasa. Dalam masyarakat agraris, akses terhadap tanah sangat penting karena menentukan kapasitas produksi. Ketika akses tersebut tidak pasti, kemampuan rumah tangga untuk mengembangkan produksi dan memperoleh dukungan modal atau teknologi juga dapat terbatas. Konsep implikasi dalam penelitian ini juga dipahami sebagai hubungan atau pengaruh suatu kondisi terhadap kondisi lain (Rizky & Qur'ani, 2022).

Kerangka konseptual penelitian ini karena itu menghubungkan tiga unsur. Pertama, perubahan hubungan penguasaan lahan menciptakan konflik kepentingan. Kedua, mediasi dapat menurunkan konflik terbuka tetapi tidak otomatis menghilangkan ketegangan laten. Ketiga, ketegangan laten memengaruhi hubungan kerja sama dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Kerangka ini tidak digunakan untuk menyatakan hubungan sebab-akibat secara statistik, tetapi untuk menjelaskan proses sosial yang ditemukan melalui data lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian bertujuan memahami kondisi alamiah konflik laten dan kehidupan ekonomi masyarakat, termasuk pengalaman, pandangan, tindakan, dan hubungan sosial para pihak. Peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap situasi lapangan, tetapi mengamati fenomena dan menggali informasi dari informan yang mengetahui persoalan yang diteliti.

Artikel ini merupakan konstruksi ulang dari penelitian lapangan Samlan (2023) dengan penyesuaian struktur, pemadatan uraian, dan penguatan sintesis analitis agar sesuai dengan karakter artikel jurnal.

Penelitian dilaksanakan di Desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Lokasi dipilih karena di desa tersebut terdapat hubungan konflik antara PT. Sadhana dan petani penggarap yang telah mengalami perubahan dari konflik terbuka menjadi konflik laten. Pengumpulan data lapangan berlangsung pada 2-15 Mei 2023.

Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Senanggalih, dengan informan yang dipilih secara purposif. Informan berjumlah 16 orang yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, petani/wiraswasta, dan petani

penggarap. Komposisi tersebut digunakan untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai sejarah konflik, respons terhadap perusahaan, kondisi lahan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Tabel 1. Komposisi Informan Penelitian

Kategori informan	Jumlah	Fokus informasi
Kepala desa	1	Kebijakan desa, konflik, dan mediasi
Sekretaris desa	1	Administrasi dan program perusahaan
Perangkat desa	1	Kondisi sosial dan respons desa
Tokoh masyarakat	1	Sejarah konflik dan persepsi masyarakat
Petani/wiraswasta	1	Konflik dan aktivitas ekonomi
Petani/petani penggarap	11	Pengalaman lahan, konflik, dan produksi
Total	16	

Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pelengkap. Observasi diarahkan pada tujuh indikator konflik laten, yaitu gossip, complaining/bitching/venting, surveillance, ignoring requests, delaying response, hidden agendas, dan lumping it. Untuk aspek ekonomi, observasi diarahkan pada kegiatan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi.

Wawancara dilakukan kepada pihak yang dianggap mengetahui konflik, terutama pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan petani penggarap. Pedoman wawancara mencakup sejarah masuknya perusahaan, status dan pengalaman pengelolaan lahan, proses konflik terbuka, mediasi, hubungan setelah konflik, program kemitraan, mata pencaharian, produksi, pekerjaan, pemasaran, serta kontribusi perusahaan terhadap sarana dan prasarana.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi cara, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan petani. Triangulasi cara dilakukan dengan membandingkan hasil observasi dan wawancara. Triangulasi waktu dilakukan dengan memperhatikan kondisi pengumpulan data pada waktu yang berbeda sehingga informasi yang diperoleh dapat diuji konsistensinya.

Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data diklasifikasikan ke dalam tema pola konflik laten dan implikasi ekonomi. Selanjutnya, temuan ditafsirkan menggunakan konsep konflik laten, relasi kekuasaan, konflik sosial, dan sosiologi ekonomi. Artikel ini mempertahankan konteks empiris skripsi dan tidak mengubah data lapangan menjadi klaim kuantitatif yang tidak tersedia dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa Senanggalih

Masyarakat Desa Senanggalih mempunyai struktur ekonomi yang kuat pada sektor pertanian. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, buruh tani, dan buruh perkebunan. Selain itu terdapat pedagang eceran dan aktivitas peternakan dalam skala kecil. Profil desa tahun 2022 yang digunakan dalam penelitian mencatat 23 jenis pedagang eceran dengan nilai aset Rp879.425.000,00. Namun, sektor pertanian tetap menjadi tumpuan utama pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dari sisi ketenagakerjaan, terdapat 1.496 orang dalam kelompok angkatan kerja usia 18-56 tahun. Sebanyak 821 orang bekerja, tetapi 559 orang bekerja tidak tentu dan 262 orang bekerja penuh. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pekerjaan tidak tetap cukup dominan. Situasi ini membuat akses terhadap sumber produksi dan peluang kerja menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi rumah tangga.

Data kesejahteraan keluarga menunjukkan 722 kepala keluarga, terdiri atas 222 keluarga prasejahtera, 336 keluarga sejahtera 1, 102 keluarga sejahtera 2, 51 keluarga sejahtera 3, dan 11 keluarga sejahtera 3 plus. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga berada pada kategori prasejahtera dan sejahtera 1. Dengan struktur ekonomi seperti itu, gangguan terhadap produksi pertanian dapat mempunyai konsekuensi sosial-ekonomi yang berarti.

Pertanian masyarakat menghasilkan antara lain jagung, padi, dan cabai. Jagung disebut sebagai komoditas yang menonjol dan profil desa mencatat rata-rata produksi 68 ton per hektare. Angka tersebut merupakan data sekunder yang digunakan dalam skripsi, bukan hasil pengukuran ulang dalam penelitian ini. Yang menjadi titik analisis adalah ketergantungan masyarakat pada pertanian dan hubungan ketergantungan tersebut dengan akses lahan.

Perubahan Konflik Terbuka Menjadi Konflik Laten

Konflik antara PT. Sadhana dan petani penggarap berawal dari tumpang tindih kepentingan atas kawasan yang telah lama dikelola masyarakat. PT. Sadhana memperoleh izin formal dari pemerintah pada 2011, sementara petani penggarap menyatakan telah mengelola kawasan sejak lebih lama dan sebagian menghubungkan hak kelola mereka dengan program GRAHAN. Perbedaan dasar pengakuan tersebut menghasilkan konflik tenurial karena masing-masing pihak mempunyai dasar pembenaran yang berbeda.

Konflik terbuka muncul ketika perusahaan merencanakan penanaman kayu pada lahan yang masih ditempati petani. Informan menggambarkan bahwa pada periode konflik terdapat pengusiran dan penangkapan beberapa petani serta keterlibatan aparat penegak hukum. Pemerintah kemudian melakukan mediasi melalui lembaga terkait. Proses tersebut menurunkan intensitas konflik terbuka, tetapi hasilnya tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani penggarap.

Setelah mediasi, sebagian lahan dapat dikelola perusahaan, sedangkan beberapa kawasan lain masih ditempati petani penggarap. Perusahaan menjadi lebih berhati-hati memasuki kawasan yang masih ditempati masyarakat karena adanya potensi konflik kembali. Di sisi lain, petani tetap tidak mengakui sepenuhnya legitimasi pengelolaan perusahaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa konflik telah berubah bentuk, bukan menghilang.

Peralihan tersebut dapat dijelaskan melalui konsep konflik laten. Ketika ekspresi konflik terbuka menurun, pertentangan tetap hadir melalui komunikasi, sikap, dan pilihan untuk tidak bekerja sama. Karena itu, keberhasilan mediasi dalam meredakan konfrontasi tidak identik dengan penyelesaian konflik substantif. Dalam kasus Senanggalih, persoalan akses lahan, kepercayaan, dan penerimaan program masih menjadi sumber ketegangan.

Tabel 2. Pola Konflik Laten Berdasarkan Temuan Lapangan

Indikator	Temuan	Interpretasi
Gossip	Pembicaraan mengenai PT. Sadhana dan konsesi cenderung negatif.	Narasi konflik dan ketidakpercayaan terus direproduksi.
Complaining	Petani dan sebagian pihak desa menyampaikan kekecewaan terhadap perusahaan/program.	Ketidakpuasan belum memperoleh penyelesaian.
Surveillance	Aktivitas perusahaan diamati dan kesalahan mudah diperhatikan.	Menunjukkan kewaspadaan dan rendahnya kepercayaan.
Ignoring requests	Tawaran/program perusahaan banyak ditolak atau diabaikan.	Resistensi pasif terhadap kerja sama.
Delaying response	Respons pemerintah desa terhadap rencana tertentu cenderung lambat.	Posisi pemerintah desa berada dalam situasi dilematis.
Hidden agendas	Ada kecenderungan tidak terorganisasi untuk tidak menanggapi kemitraan.	Resistensi berjalan tanpa organisasi formal.
Lumping it	Perusahaan digeneralisasi sebagai pihak yang sangat berkuasa dan mengancam lahan.	Pengalaman konflik membentuk generalisasi dan trauma sosial.

Indikator pertama adalah gossip. Observasi menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai perusahaan sering dikaitkan dengan anggapan bahwa perusahaan lebih banyak memperoleh manfaat daripada masyarakat. Program perusahaan juga cenderung dibaca sebagai upaya mengambil lahan. Pembicaraan seperti ini menjadi mekanisme reproduksi ingatan konflik, sebab pengalaman masa lalu digunakan untuk menilai tindakan perusahaan pada masa kini.

Indikator kedua adalah complaining atau pengungkapan kekecewaan. Kekecewaan tidak selalu muncul sebagai protes langsung, tetapi hadir dalam pembicaraan mengenai kemitraan, bantuan, dan manfaat perusahaan. Pemerintah desa juga berada dalam posisi sulit karena harus menyampaikan program perusahaan sekaligus menjaga hubungan dengan masyarakat yang menolak sebagian program tersebut.

Indikator ketiga, surveillance, terlihat dari kecenderungan petani mengawasi kegiatan perusahaan. Informan menyoroti penggunaan tenaga kerja dari luar desa, program yang tidak berjalan, dan kesepakatan kerja yang batal. Pengawasan semacam ini memperlihatkan bahwa hubungan antara perusahaan dan masyarakat berada dalam situasi kewaspadaan.

Indikator keempat, ignoring requests, terlihat dari penolakan atau tidak adanya respons positif terhadap program perusahaan. Bahkan ketika suatu kegiatan mempunyai dasar keputusan pemerintah, penerimaan di tingkat lokal tetap tidak otomatis terjadi. Penolakan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk resistensi pasif terhadap struktur pengelolaan yang tidak sepenuhnya mereka terima.

Indikator kelima, delaying response, terutama terlihat pada pemerintah desa. Pemerintah harus menghadapi dua posisi: perusahaan memiliki dasar legal untuk

melaksanakan program, sedangkan petani penggarap mempunyai kepentingan untuk mempertahankan akses lahan. Situasi tersebut membuat pemerintah desa tidak mudah merespons secara cepat dan tegas terhadap setiap rencana perusahaan.

Indikator keenam adalah hidden agendas. Penelitian tidak menemukan agenda rahasia yang terstruktur. Temuan yang lebih tepat adalah adanya kecenderungan tidak terorganisasi di antara petani penggarap untuk tidak menanggapi tawaran kemitraan. Ketidakresponsifan tersebut mempunyai konsekuensi, karena perusahaan kemudian lebih berhati-hati memasuki kawasan yang masih ditempati masyarakat.

Indikator ketujuh, lumping it, terlihat dari kecenderungan menggeneralisasi pengalaman konflik. Keberadaan perusahaan sering dikaitkan dengan ancaman terhadap lahan dan dengan kekuasaan yang dianggap sangat besar. Akibatnya, program yang tidak secara langsung berkaitan dengan konflik lahan dapat pula dicurigai sebagai bagian dari upaya mengambil alih lahan. Pola ini menunjukkan bahwa konflik telah membentuk memori sosial yang memengaruhi penilaian terhadap tindakan baru.

Konflik Sebagai Relasi Kekuasaan Atas Sumber Daya

Temuan tersebut dapat dibaca melalui teori konflik Dahrendorf. Konflik tidak semata-mata terjadi karena siapa yang memiliki tanah, tetapi karena siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang boleh mengakses dan mengelola sumber daya. Dalam kasus Senanggalih, PT. Sadhana mempunyai dasar kewenangan formal melalui izin pemerintah, sementara petani penggarap mempunyai pengalaman pengelolaan dan legitimasi sosial yang mereka bangun selama bertahun-tahun.

Perbedaan legitimasi menghasilkan kesenjangan posisi. Perusahaan berada dalam struktur kekuasaan yang didukung keputusan pemerintah, sedangkan petani penggarap tidak mempunyai bukti tertulis yang menurut informan dapat menyamai kekuatan izin perusahaan. Ketika keputusan mengenai pengelolaan kawasan dibuat tanpa konsensus yang dirasakan cukup oleh petani, keputusan tersebut dapat diterima secara legal tetapi tetap dipersoalkan secara sosial.

Konsekuensinya terlihat pada kemitraan. Secara ekonomi, kemitraan dapat dipahami sebagai mekanisme untuk mempertemukan kepentingan perusahaan dan masyarakat. Namun, dalam pengalaman petani penggarap, menerima kemitraan dapat dimaknai sebagai pengakuan terhadap hak kelola perusahaan. Perbedaan pemaknaan ini membuat tawaran ekonomi tidak otomatis menjadi jembatan rekonsiliasi.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa konflik agraria mempunyai dimensi material dan simbolik. Material karena lahan merupakan alat produksi. Simbolik karena penguasaan lahan berkaitan dengan harga diri, rasa aman, pengalaman historis, dan keyakinan mengenai hak untuk mengelola. Karena itu, kebijakan penyelesaian yang hanya menekankan legalitas formal belum tentu menghapus ketegangan sosial.

Implikasi Terhadap Produksi Pertanian

Implikasi konflik yang paling jelas ditemukan pada kegiatan produksi. Petani penggarap sulit meningkatkan produktivitas karena status penguasaan lahan yang tidak memberikan kepastian bagi mereka untuk memperoleh dukungan modal,

teknologi, dan sarana-prasarana pertanian. Observasi penelitian menyebut bahwa produksi tetap berlangsung, tetapi cenderung tidak berkembang secara maksimal. Hubungan tersebut menunjukkan mekanisme sosial yang penting. Ketidakpastian lahan tidak secara otomatis menghentikan aktivitas pertanian, karena masyarakat tetap harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, ketidakpastian mengurangi ruang investasi dan pengembangan produksi. Petani cenderung mempertahankan kegiatan yang dapat dilakukan dengan sumber daya yang tersedia, sementara peluang peningkatan produktivitas menjadi terbatas.

Konflik juga berdampak pada perusahaan. Beberapa rencana pemanfaatan kawasan tidak dapat dijalankan secara maksimal karena masih terdapat penolakan masyarakat. Dengan demikian, konflik bersifat relasional: petani menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan pertanian, sedangkan perusahaan juga menghadapi keterbatasan dalam menjalankan program pemanfaatan kawasan. Rencana pembentukan kelompok ternak menunjukkan hubungan tersebut. Desa mempunyai potensi lahan untuk mendukung peternakan kambing dan sapi, dan perusahaan pernah mempunyai rencana membentuk kelompok ternak. Akan tetapi, penolakan masyarakat dan tidak adanya contoh usaha yang cukup meyakinkan membuat rencana tersebut tidak berjalan di kawasan Senanggalih. Pada kawasan lain, informan menyebut adanya kegiatan peternakan tetapi tenaga kerja yang digunakan banyak berasal dari luar wilayah desa. Pengalaman tersebut memperkuat persepsi bahwa manfaat ekonomi perusahaan belum cukup dirasakan masyarakat lokal.

Implikasi Terhadap Kesempatan Kerja Dan Pemberdayaan

Kesempatan kerja merupakan bagian penting dari ekonomi Desa Senanggalih karena proporsi pekerja tidak tetap cukup besar. Dalam konteks ini, perusahaan sebenarnya mempunyai potensi menjadi sumber pekerjaan lokal. Namun, penelitian menemukan bahwa penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar belum optimal. Informan menyoroti penggunaan tenaga kerja dari luar desa dalam beberapa kegiatan, sementara pemuda lokal masih banyak bekerja secara serabutan.

Keadaan tersebut memperkuat jarak sosial. Pekerjaan tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga menjadi sarana interaksi dan integrasi antara perusahaan dan masyarakat. Apabila masyarakat tidak mempunyai akses terhadap kesempatan kerja, keberadaan perusahaan lebih mudah dipahami sebagai aktor eksternal yang menguasai sumber daya daripada sebagai bagian dari ekonomi lokal.

Perusahaan juga memberikan bantuan dalam bentuk sumbangan untuk pembangunan mushala, perbaikan jalan desa, jalan usaha tani, sumur bor, dan kegiatan sosial. Informasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kontribusi sosial. Namun, bantuan yang bersifat insidental belum sama dengan pemberdayaan ekonomi yang menghasilkan kapasitas produksi dan kesempatan kerja berkelanjutan.

Persoalan ini menunjukkan perbedaan antara kontribusi sosial dan integrasi ekonomi. Pembangunan sarana dapat membantu masyarakat dalam jangka tertentu, tetapi pemberdayaan membutuhkan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan penerimaan manfaat. Dalam situasi konflik laten, proses tersebut sulit berlangsung karena tingkat kepercayaan antarpihak belum kuat.

Konflik juga membuat peluang kemitraan tidak berkembang. Tawaran perusahaan tidak selalu diterima, sementara perusahaan tidak dapat menjalankan program secara maksimal ketika masyarakat menolak. Dengan demikian, terdapat lingkaran yang saling menguatkan: ketidakpercayaan menghasilkan penolakan, penolakan menghambat program, minimnya manfaat yang terlihat memperkuat ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan kemudian mempertahankan konflik laten.

Distribusi, Pertukaran, Dan Konsumsi

Penelitian tidak menemukan hubungan langsung yang kuat antara konflik laten dengan kegiatan distribusi, pertukaran, dan konsumsi. Hasil pertanian tetap dipasarkan dan masyarakat tetap melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian hasil pertanian dipasarkan melalui pengepul. Dengan demikian, tidak tepat menyimpulkan bahwa konflik menghentikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun, distribusi tetap mempunyai kendala tersendiri. Petani menghadapi keterbatasan jangkauan pasar dan kesulitan memperoleh harga yang lebih tinggi. Pasar tradisional desa menjadi salah satu tempat pemasaran, sedangkan akses menuju pasar dengan harga lebih baik terbatas. Dalam situasi ini, konflik lebih kuat berhubungan dengan produksi daripada distribusi.

Pertukaran dan konsumsi juga tetap berlangsung karena rumah tangga harus mempertahankan kehidupannya. Masyarakat menggunakan pendapatan pertanian dan pekerjaan lain yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Implikasi konflik karena itu bersifat tidak langsung terhadap kedua aktivitas tersebut. Konflik lebih memengaruhi kapasitas pengembangan sumber pendapatan daripada menghilangkan aktivitas ekonomi yang sudah berjalan.

Tabel 3. Implikasi Konflik Laten terhadap Aktivitas Ekonomi

Aktivitas	Temuan penelitian	Keterkaitan
Produksi	Akses lahan, modal, teknologi, dan sarana pertanian terbatas; produktivitas sulit berkembang.	Langsung dan paling kuat
Distribusi	Hasil pertanian tetap dipasarkan, tetapi akses pasar dan posisi tawar masih terbatas.	Tidak langsung
Pertukaran	Tidak ditemukan perubahan langsung yang menonjol akibat konflik.	Minimal/tidak langsung
Konsumsi	Rumah tangga tetap memenuhi kebutuhan melalui pertanian dan pekerjaan lain.	Tidak langsung
Kesempatan kerja	Penyerapan tenaga kerja lokal dinilai terbatas; beberapa kegiatan memakai pekerja dari luar.	Cukup kuat
Pemberdayaan	Ada bantuan sosial/infrastruktur, tetapi belum menjadi perubahan ekonomi berkelanjutan.	Cukup kuat

Konflik Laten Dan Tata Kelola Ekonomi Lokal

Jika seluruh temuan disatukan, konflik laten di Senanggalih dapat dipahami sebagai persoalan tata kelola hubungan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah desa mempunyai posisi dilematis karena harus memfasilitasi program perusahaan yang memiliki dasar izin formal sekaligus menjaga hubungan dengan petani penggarap. Ketika komunikasi tidak menghasilkan kesepahaman, pemerintah lebih banyak berfungsi sebagai mediator ketika konflik meningkat daripada sebagai pengelola dialog yang berlangsung terus-menerus.

Mediasi pada konflik terbuka memang menghasilkan penurunan konfrontasi. Akan tetapi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa akar ketegangan belum sepenuhnya diselesaikan. Petani penggarap masih menyimpan ketidakpercayaan, sedangkan perusahaan masih menghadapi hambatan dalam memasuki kawasan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa resolusi konflik memerlukan lebih dari penghentian kekerasan atau keputusan mediasi.

Dalam perspektif Coser, konflik dapat berfungsi sebagai komunikasi karena persoalan yang sebelumnya kurang diperhatikan menjadi tampak. Pada kasus ini, konflik memperlihatkan persoalan mengenai status akses lahan, komunikasi kebijakan, manfaat ekonomi, kesempatan kerja, dan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana persoalan tersebut diterjemahkan menjadi dialog yang menghasilkan perubahan hubungan, bukan sekadar meredakan gejala konflik.

Resistensi pasif menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui tindakan terbuka. Tidak merespons tawaran kemitraan, menolak program, dan menjaga jarak terhadap aktivitas perusahaan merupakan tindakan sosial yang mempunyai konsekuensi ekonomi. Perusahaan menjadi berhati-hati memasuki kawasan, sedangkan masyarakat juga kehilangan peluang untuk memperoleh manfaat dari program yang mungkin dapat membuka kesempatan ekonomi.

Karena itu, penyelesaian konflik perlu bergerak dari pendekatan administratif menuju pengelolaan hubungan sosial. Pemerintah perlu memperkuat komunikasi dua arah, perusahaan perlu meningkatkan pelibatan masyarakat lokal, dan masyarakat perlu mempunyai ruang untuk menyampaikan kepentingan secara terorganisasi. Temuan penelitian juga menunjukkan pentingnya membangun program ekonomi yang konkret dan dapat dirasakan, bukan hanya bantuan insidental.

Pada tingkat masyarakat, penguatan organisasi dan kerja sama dapat menjadi modal sosial untuk memperjuangkan kepentingan sekaligus mengembangkan aktivitas ekonomi. Pada tingkat perusahaan, pemanfaatan kawasan perlu mempertimbangkan kondisi sosial setempat agar kegiatan usaha tidak menghasilkan ketegangan baru. Pada tingkat pemerintah, mediasi perlu dikembangkan menjadi mekanisme dialog berkelanjutan yang mempertemukan kepentingan legal, sosial, dan ekonomi.

Temuan penelitian akhirnya memperlihatkan paradoks konflik laten. Konflik membatasi kemampuan petani meningkatkan produksi, tetapi pada saat yang sama juga membatasi kemampuan perusahaan menjalankan program. Akibatnya, kedua pihak mengalami hambatan dan masyarakat tidak memperoleh manfaat ekonomi yang optimal. Situasi tersebut dapat disebut sebagai stagnasi relasional, yaitu keadaan ketika konflik tidak lagi terbuka tetapi tetap menghambat kerja sama yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi lokal.

KESIMPULAN

Konflik antara PT. Sadhana dan petani penggarap di Desa Senanggalih tidak berakhir ketika konflik terbuka berhasil diredam melalui mediasi. Konflik berubah menjadi konflik laten karena perbedaan kepentingan mengenai akses dan pengelolaan lahan belum memperoleh penyelesaian yang diterima bersama. Konflik laten terlihat melalui tujuh pola, yaitu gossip, complaining/bitching/venting, surveillance, ignoring requests, delaying response, hidden agendas, dan lumping it. Bentuk yang paling menonjol adalah pembicaraan negatif, kekecewaan, pengawasan, penolakan program, keterlambatan respons, resistensi pasif terhadap kemitraan, dan generalisasi ketidakpercayaan.

Implikasi ekonomi paling kuat terdapat pada kegiatan produksi pertanian. Ketidakpastian akses lahan berkaitan dengan keterbatasan akses petani penggarap terhadap modal, teknologi, dan sarana-prasarana sehingga peningkatan produktivitas menjadi sulit. Di sisi lain, perusahaan belum mampu memberikan penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat yang dinilai signifikan oleh informan. Bantuan sosial dan infrastruktur memang ditemukan, tetapi belum berkembang menjadi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Distribusi, pertukaran, dan konsumsi tetap berlangsung sehingga konflik tidak dapat dinyatakan menghentikan seluruh aktivitas ekonomi desa. Implikasi terhadap ketiga aktivitas tersebut lebih bersifat tidak langsung. Dengan demikian, konflik laten lebih tepat dipahami sebagai faktor sosial yang membatasi peluang pengembangan produksi, kesempatan kerja, dan integrasi ekonomi lokal.

Penanganan konflik perlu bergerak dari sekadar meredakan konflik terbuka menuju pengelolaan konflik laten dan pembangunan hubungan sosial yang lebih partisipatif. Pemerintah desa perlu memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan perusahaan; masyarakat perlu memperkuat organisasi dan kapasitas ekonomi produktif; sedangkan perusahaan perlu meningkatkan pelibatan tenaga kerja lokal dan merancang program pemberdayaan yang berkelanjutan. Rekomendasi tersebut merupakan konsekuensi dari temuan lapangan penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Senanggalih, tokoh masyarakat, petani penggarap, dan seluruh informan yang telah memberikan informasi selama penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi, serta pihak-pihak yang membantu proses penelitian dan penyusunan artikel.

IMPLIKASI TEORETIS TEMUAN PENELITIAN

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konflik laten dapat dipahami sebagai kondisi ketika hubungan sosial tampak relatif tenang, tetapi pertentangan kepentingan masih bekerja di balik interaksi sehari-hari. Setelah mediasi, intensitas konfrontasi menurun, namun indikator konflik tetap muncul dalam komunikasi dan perilaku. Hal tersebut memperkuat pemahaman bahwa konflik tidak cukup diidentifikasi melalui kekerasan, demonstrasi, atau benturan terbuka. Ketegangan juga dapat bertahan melalui penolakan, pengawasan, tidak merespons permintaan, dan pembentukan narasi negatif mengenai pihak lain.

Dalam perspektif Lewis Coser, konflik dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi karena membuat persoalan yang sebelumnya kurang memperoleh perhatian menjadi terlihat. Pada kasus Senanggalih, konflik memperlihatkan

persoalan mengenai akses lahan, hubungan antara legalitas formal dan pengalaman pengelolaan masyarakat, manfaat ekonomi, kesempatan kerja, dan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Akan tetapi, fungsi komunikatif tersebut belum sepenuhnya menghasilkan konsensus baru. Ketika kepentingan pokok belum bertemu, konflik justru dapat bertahan sebagai ketegangan laten yang memengaruhi hubungan sosial.

Perspektif Dahrendorf juga membantu menjelaskan mengapa posisi para pihak tidak seimbang. Perusahaan mempunyai kekuatan formal yang bersumber dari izin pemerintah, sedangkan petani penggarap mempunyai kekuatan sosial yang bertumpu pada pengalaman panjang mengelola lahan dan kemampuan mempertahankan penolakan secara kolektif. Resistensi pasif menjadi penting karena memperlihatkan bahwa pihak yang relatif lemah tetap mempunyai kapasitas untuk memengaruhi pelaksanaan program melalui tindakan tidak bekerja sama. Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya terlihat ketika suatu pihak memerintah, tetapi juga ketika pihak lain mampu menunda, menolak, atau tidak merespons.

Dari perspektif sosiologi ekonomi, konflik tidak hanya berkaitan dengan perubahan pendapatan, tetapi juga dengan kesempatan mengakses faktor produksi dan jaringan ekonomi. Ketika petani penggarap tidak mempunyai kepastian terhadap lahan, mereka menghadapi hambatan untuk mengembangkan produksi dan memperoleh dukungan tertentu. Ketika perusahaan sulit membangun komunikasi dengan masyarakat, program kerja, perekrutan tenaga lokal, dan kemitraan juga tidak berkembang maksimal. Konflik menghasilkan konsekuensi ekonomi melalui relasi sosial tersebut, bukan semata-mata melalui kerusakan fisik atau berhentinya aktivitas ekonomi.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik perlu dipandang sebagai proses jangka panjang. Mediasi dapat mengurangi konflik terbuka, tetapi belum tentu menghapus memori sosial, ketidakpercayaan, dan perbedaan legitimasi. Karena itu, resolusi yang lebih substantif membutuhkan komunikasi berkelanjutan dan mekanisme partisipasi yang memungkinkan pihak-pihak menjelaskan kepentingannya. Dalam konteks Senanggalih, pembangunan ekonomi lokal tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan hubungan sosial antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

Secara praktis, konflik dapat menjadi sumber informasi untuk memperbaiki tata kelola apabila pihak-pihak terkait bersedia membaca indikator konflik laten sejak dini. Gossip dan keluhan menunjukkan persoalan persepsi; surveillance menunjukkan rendahnya kepercayaan; penolakan program menunjukkan tidak adanya penerimaan sosial; sedangkan keterlambatan respons menunjukkan persoalan koordinasi. Apabila gejala tersebut ditangani melalui dialog dan program ekonomi yang konkret, konflik dapat diarahkan menjadi proses negosiasi. Sebaliknya, apabila dibiarkan, ketegangan yang tersimpan dapat kembali berkembang menjadi konflik terbuka.

REFERENSI

- Damsar. (2002). *Sosiologi ekonomi*: Edisi revisi. PT RajaGrafindo Persada.
- Dewi, S. F. (2019). *Teori, metode & strategi pengelolaan konflik lahan*. CV IRDH.
- El Amady, M. R. (2021). *Manajemen konflik sumber daya alam: Penanganan konflik secara detail, cepat dan tepat berbasis pengalaman 13 tahun*. Deepublish.

- Hariyanto, A. (2011). *Analisis stakeholder dalam pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) di wilayah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tastura (studi kasus Desa Sukadana Kabupaten Lombok Utara)* [Laporan penelitian].
- Ishaq, H. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi*. Alfabeta.
- Muar(y), R. (2018). Konflik laten antara penganut agama Sikh dan Tamil di Kota Medan. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 1(1), 63-80.
- Muspawi, M. (2014). Manajemen konflik (upaya penyelesaian konflik dalam organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 16(2), 41-46.
- Novianti, D., Suwarni, N., & Nugraheni, I. L. (2018). Kondisi sosek keluarga petani penggarap Desa Rawi Penengahan Lampung Selatan tahun 2016. *Jurnal Penelitian Geografi*, 6(1).
- Qur'ani, R. R. N. (2022). Implikasi konflik dalam novel Bisikan dari Langit karya Galang Lufityanto: Pendekatan struktural. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(8), 1207-1224. <https://doi.org/10.53625/joel.v1i8.1820>
- Rahmadi, P. Z., Permatasari, A. F., Sayekti, A. W., Dewanti, A. C., Novitasari, D., Primora, K., & Zunariyah, S. (2018). Konflik laten pencemaran lingkungan bantaran Sungai Pepe Kota Surakarta. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 7(2), 243-261.
- Raho, B. (2021). *Teori sosiologi modern* (Edisi revisi). Ledalero.
- Samlan. (2023). *Implikasi konflik laten antara PT. Sadhana dengan petani penggarap terhadap perekonomian masyarakat di Desa Senanggalih Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur* [Skripsi, Universitas Hamzanwadi].
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi suatu pengantar*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Cet. 18). Alfabeta.
- Wahyudi. (2021). *Teori konflik dan penerapannya pada ilmu-ilmu sosial*. UMMPress.
- Yahya, S. D., & Yulianto, H. (2018). Burnout sebagai implikasi konflik peran ganda (pekerjaan-kuliah) pada mahasiswa yang bekerja di Kota Makassar. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 15(4), 564-573. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/517>